

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Untuk menciptakan keamanan, negara saling berjuang meningkatkan kekuatan (*power*). Sudah bukan rahasia umum, bahwa negara berjuang meningkatkan kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman (*threat*) yang datang, baik itu secara internal maupun eksternal. Negara juga meningkatkan kekuatan untuk mencapai kepentingan (*interest*) sendiri. Pasalnya, negara dipandang sebagai aktor rasional yang bertindak atas dirinya sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, negara sangat mementingkan kekuatan (*power*), terutama dalam peningkatan kekuatan pertahanan.

Tidak dapat dielakkan lagi, setiap negara harus memilih strategi pertahanan yang sesuai untuk mendapatkan kekuatan (*power*) demi terciptanya keamanan. Usaha perjuangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tindakan untuk memperebutkan kekuatan. Pada dasarnya, untuk meredam ambisi akan perebutan kekuatan, maka negara pun berupaya menciptakan perimbangan kekuatan dengan strategi yang sesuai pilihannya.

1.1.1 Kondisi Keamanan Selat Malaka

Strategi yang digunakan negara dalam menciptakan keamanan sangat beragam dengan alasan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari sikap Indonesia dalam menjaga keamanan di Selat Malaka yang mempunyai fungsi strategis. Pasalnya, Selat Malaka yang dikelilingi oleh *littoral state* (negara pantai), yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura ini tidak hanya digunakan sebagai jalur *Sea Line of Communication* (SLOC) bagi perdagangan dunia, tapi juga merupakan *choke point*¹ armada angkatan laut dalam melakukan *forward presence* ke seluruh

¹ U.S. Energy Information Administration (EIA) mendefinisikan bahwa *Chokepoints are narrow channels along widely used global sea routes. They are a critical part of global energy security due to the high volume of oil traded through their narrow straits.* Lihat *World Oil Transit Chokepoints*. http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Background.html.

penjuru dunia, terutama antara Timur Tengah dan Asia Timur.² Setiap tahun, sedikitnya 60.000 kapal³ melintasi Selat Malaka, dengan 72% kapal tanker yang melintasnya mengangkut pasokan bahan energi melintas dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik, utamanya ke Jepang, Cina dan Korsel. Pada tahun 2002, setiap harinya 10,3 juta barel minyak diangkut melalui selat ini⁴ dan jumlah ini meningkat pada tahun 2006 menjadi 15 juta barel.⁵

Kondisi geografis dan aktivitas pelayaran di selat ini, menjadikan Selat Malaka sebagai sasaran empuk, terutama soal *piracy* dan *arms robbery againts ships*.⁶ Serangan pada kapal tanker dalam jumlah besar terjadi pada tahun 1999, yaitu pada kapal *Tenyu Thailand* dan *Petro Ranger* milik Singapura di lepas pantai Malaysia, dan *Atlanta* milik Indonesia di Selat Riau.⁷ Peningkatan cukup signifikan tercatat ketika tahun 1994 terjadi 25 serangan, sedangkan pada tahun 2000 terjadi 220 serangan, kemudian terjadi penurunan sekitar 150 serangan lebih pada tahun 2003. Namun, frekuensi kembali meningkat pada tahun 2004 dimana telah terjadi serangan sebanyak 190 kali, dan sejak terjadinya tsunami di Aceh pada Desember 2004 hingga Februari 2005 telah terjadi serangan sebanyak 10

Dalam strategi militer, sebuah *choke point* merupakan fitur geografis di darat seperti lembah atau jembatan, atau di laut yang berupa selat dimana kekuatan bersenjata dapat melewati untuk mencapai tujuannya.

² *World Oil Transit Chokepoints* lihat

http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Background.html.

³ Roach, J. Ashley. 2005. *Enhancing Maritime Security in The Straits of Malacca and Singapore* dalam *Journal of International Affairs*, vol 59 no. 1, New York. Hal 100

⁴ *Ibid*

⁵ *World Oil Transit Chokepoints*. Opcit.

⁶ *International Maritime Organization* (IMO) mendefinisikan *piracy* sesuai dengan Pasal 101 UNCLOS 1982, yaitu (a) *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; (b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; (c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b)*. Berdasarkan definisi ini maka *piracy* hanya dapat terjadi di laut lepas dan tidak muncul pada laut teritorial, laut kepulauan dan laut pedalaman. Lalu, *arms robbery against ships* sebagai semua tindakan yang melawan hukum yang menyerang kapal, manusia dan barang yang berada di kapal.

International Maritime Bureau (IMB) mendefinisikan *piracy* dan *arms robbery against ships* sebagai semua tindakan penyerangan terhadap kapal niaga dimana pun itu berlokasi. (Roach, J. Ashley. 2005. *Enhancing Maritime Security in The Straits of Malacca and Singapore* dalam *Journal of International Affairs*, vol 59 no. 1. hal 101, New York)

⁷Roach, J. Ashley. 2005. *Enhancing Maritime Security in The Straits of Malacca and Singapore* dalam *Journal of International Affairs*, vol 59 no. 1. New York. hal 101

kali.⁸ Bahkan, *Lloyd's Market Association Joint War Committee* (Badan Asuransi Perdagangan) memasukkan Selat Malaka ke dalam 21 daftar *deemed high-risk for merchant ships and prone to war, strikes, terrorism and other such perils*.⁹ Selain itu, ada beberapa masalah ancaman keamanan lain yang muncul di Selat Malaka yaitu *drug trafficking*, penyelundupan manusia dan barang, dan juga pencemaran yang terjadi karena kebocoran minyak.

Pada kenyataannya, penerapan istilah masalah keamanan yang terjadi di Selat Malaka tersebut turut memengaruhi setiap strategi yang dilakukan. Dalam hal ini berkaitan dengan implikasi politik penggunaan istilah *piracy* dan *robbery* sangat jauh berbeda. Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), setiap negara boleh mengatasi perompakan. Jika penyerangan terhadap kapal di Selat Malaka dianggap sebagai perompakan, maka setiap negara boleh ikut memerangnya secara langsung. Akan tetapi, karena penyerangan terhadap kapal tersebut tidak bisa dikatakan perompakan, negara yang berhak menanganinya hanyalah pemilik ketiga selat yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Sesungguhnya, wilayah Selat Malaka dalam lingkup kawasan Asia Tenggara menjadi fokus perhatian masyarakat internasional karena lalu-lintas transportasi perdagangan dunia melalui perairan tersebut. Posisi strategis Selat Malaka memicu negara-negara dengan kekuatan besar untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Namun, bagi Indonesia pengamanan langsung Selat Malaka merupakan hak kedaulatan bagi Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Namun, Indonesia tetap mengakui kepentingan pengguna lainnya dan berpartisipasi dalam pengamanan tidak langsung dalam bentuk pembangunan kapasitas seperti pendidikan, pelatihan maupun berbagai informasi.¹⁰

⁸ Lihat *ICC Appeals for Naval Protection Against Pirates*, 7 November 2005. www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104:icc-appeal.

⁹ Roach, J. Ashley. 2005. *Enhancing Maritime Security in The Straits of Malacca and Singapore* dalam *Journal of International Affairs*, vol 59 no. 1. hal 101, New York hal 102. Badan ini menyejajarkan kondisi Selat Malaka dengan Irak, Somalia dan Libanon. Meski pada akhirnya, menurut laporan IMB, Badan ini mengeluarkan Selat Malaka dari daftar tersebut pada Oktober 2006 (*Global Piracy Decreasing but Hotspots Remain Deadly*) lihat www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=123:global-pir.

¹⁰ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: Dephan RI. Hal 17.

1.1.2 Kerjasama *Littoral State* di Selat Malaka

Strategi untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka telah dilakukan oleh ketiga negara di selat tersebut. Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia membentuk forum tiga negara pada tingkatan Menteri Luar Negeri yang membahas masalah pengamanan di Selat Malaka dan rentannya masalah pembajakan. Pertemuan tersebut terwujud dalam pertemuan Tripartit Tingkat Menteri di Batam pada 2 Agustus 2005. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menlu RI Hassan Wirajuda, Menlu Malaysia Syed Hamid Albar, dan Menlu Singapura George Yeo. Secara kontekstual, jaminan keamanan bagi keselamatan kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka merupakan tanggung jawab *littoral state* di wilayah tersebut yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Ketiga negara pantai di Selat Malaka menggelar kegiatan patroli terkoordinasi yang melibatkan angkatan laut dari ketiga negara itu. Patroli tersebut bukanlah patroli bersama atau *joint patrol*, melainkan patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*) yang dilaksanakan sepanjang tahun. Sebelumnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura juga menjalin patroli terkoordinasi bilateral, seperti Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo), antara Indonesia-Singapura (Patkor Indosin), dan antara Malaysia-Singapura (Patkor Malapura). Ketiga negara juga memiliki patroli terkoordinasi trilateral, yaitu Malsindo (Malaysia-Singapura-Indonesia) yang dilakukan secara rutin di perairan Selat Malaka. Selain itu, masing-masing negara sudah mempunyai pos-pos koordinasi, seperti Batam dan Belawan di Indonesia, Lumut di Malaysia, serta Changi *Naval Base* di Singapura.¹¹ Lebih lanjut, patroli terkoordinasi yang semula hanya dilakukan *littoral state* kini juga mengikutsertakan Thailand setelah sebelumnya sempat tertunda-tunda.¹²

¹¹ *Patroli Koordinasi Malsindo Diluncurkan di Selat Malaka* lihat <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=5790>

¹² Lihat *Thailand Ikut Amankan Selat Malaka*. November 2008. <http://www.majalahdefender.com/2008/11/thailand-ikut-amankan-selat-malaka.html>

1.1.3 Tawaran *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka

Peningkatan kerjasama (strategi) pertahanan keamanan yang dilakukan *littoral state*, tidak menutup perhatian dunia untuk turut berpartisipasi aktif menjaga keamanan di Selat Malaka. Pada tahun 2005, Pemerintah Jepang menawarkan untuk ikut memberikan pengamanan di Selat Malaka. Saat itu, Menteri Perhubungan, Hatta Radjasa menyatakan penolakan atas tawaran tersebut. Pasalnya, Selat Malaka masih menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, Indonesia tidak menginginkan wilayah Selat Malaka diperluas menjadi tanggung jawab kawasan regional. Oleh karena itu, Indonesia yang harus menjaga wilayahnya sendiri, meski memiliki peralatan yang rapuh.

Selain Jepang, Amerika juga melancarkan aksinya untuk menggelar *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka. *Proliferation Security Initiative* (PSI) merupakan sebuah tindakan global dalam upaya mencegah penyebaran akan pengembangan *Weapons of Mass Destruction* (WMD), sistem pengirimannya dan juga materialnya, yang dideklarasikan oleh Presiden AS George W. Bush pada 31 Mei 2003.¹³ Sesungguhnya keterlibatan AS dalam PSI merupakan pengembangan akan strategi nasionalnya, yang tentunya juga mencerminkan kepentingan nasional AS.

Proliferation Security Initiative dilakukan dengan cara menginterdiksi setiap kapal dan pesawat yang dicurigai melakukan penyebaran WMD. Inisiatif ini bekerja dalam tiga cara¹⁴, yaitu memfokuskan interdiksi sebagai *a key component of global counter proliferation strategy*. Kedua, PSI menetapkan bahwa setiap negara partisipan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitas dan otoritas nasional. Ketiga, meski PSI bukan organisasi formal, tapi PSI dapat menjadi dasar setiap negara partisipan untuk melakukan tindakan khusus dalam penanganan proliferasi WMD. Melalui PSI, AS menegaskan bahwa dibutuhkan usaha serius untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal dengan menginterdiksi setiap tempat yang dicurigai memuat senjata tersebut. Oleh karena itu, AS mengajak negara-negara di dunia untuk berpartisipasi aktif dalam

¹³Lihat *The Proliferation Security Initiative* (PSI) dalam *DISAM Journal of International Security Assistance Management*. 30 September 2008. Hal 40

¹⁴ *Ibid*

PSI yang juga mendapat dukungan dari Resolusi DK PBB No. 1540 tahun 2004 mengenai usaha pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal.¹⁵

Terkait dengan kondisi Selat Malaka yang demikian, AS gencar melobi *littoral state*, terutama Indonesia. Di sisi lain, Singapura sudah bergabung dengan PSI sejak tahun 2004. Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice dalam kunjungannya pada 14-15 Maret 2006 mengajak Indonesia untuk bergabung dengan PSI. Namun, hal tersebut ditolak oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, hal ini dikemukakan oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri Desra Percaya.¹⁶

Usaha Amerika Serikat untuk mengajak Indonesia ikut serta dalam PSI berlanjut pada kunjungan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, 6 Juni 2006. Rumsfeld mendiskusikan mengenai restorasi hubungan militer AS dan Indonesia melalui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.¹⁷

Amerika Serikat tidak berhenti sampai disitu, pada 20 November 2006, Presiden George W. Bush mengunjungi Indonesia dengan salah satu agenda utamanya adalah melakukan pendekatan diplomatis mengajak Indonesia untuk turut bergabung dengan PSI. Meski Indonesia sudah menolak PSI pada tahun 2006, tapi pada 22 Februari 2008, Menteri Pertahanan AS Robert Gates berkunjung ke Indonesia dengan salah satu tujuan utamanya untuk tetap membujuk Indonesia turut serta dalam PSI.¹⁸

Keberatan Indonesia untuk bergabung dengan PSI jmengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS. Indonesia memilih untuk melakukan kerja sama keamanan hanya dengan *littoral state* lainnya di selat tersebut. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang sepakat bahwa Selat Malaka merupakan tanggung jawab bersama *littoral state* yang berkaitan

¹⁵ *The PSI represents an important pillar in the architecture of the international non-proliferation regime and together with UN Security Council Resolution 1540 (April 2004) is helping to reinforce global non-proliferation norms.* Hal ini ditegaskan Richard Bond dalam pernyataan tiga tahun PSI (2 Agustus 2006).

¹⁶ *Indonesia Tolak Ajakan AS Bergabung dalam PSI.* Majalah Gatra edisi 17 Maret 2006. www.gatra.com/2006-03-17/versi_cetak.php?id=93066.

¹⁷ *Rumsfeld's Indonesia Visit Cements US Military Ties.* ABC News. 6 Juni 2006. www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=2695.

¹⁸ *Menhan AS datang ke Indonesia incar Selat Malaka.* 25 Februari 2008. <http://news.okezone.com/read/2008/02/25/1/86418/menhan-as-datang-ke-indonesia-incar-selat-malaka>.

dengan wilayah kedaulatan dan integritas teritorial. Lebih lanjut, pada 26 Juni 2008, Direktur Perjanjian Internasional – Departemen Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa Indonesia masih belum bisa menerima PSI karena inisiatif ini menyangkut berbagai aspek hukum internasional yang masing-masing memiliki peraturan tersendiri, terkait dengan isu perlucutan senjata, hukum laut, hukum udara dan hukum transportasi darat.¹⁹

Hal ini sejalan dengan kewenangan pengaturan lalu lintas di Selat Malaka, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 21 UNCLOS 1982, bahwa kewenangan tersebut merupakan tanggung jawab Indonesia, Singapura dan Malaysia.²⁰ Selain itu, Pasal 23 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa kapal nuklir dan kapal bermuatan barang nuklir diperbolehkan melakukan pelayaran.²¹ Tentunya hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip PSI yang menginterdiksi setiap kapal yang membawa senjata pemusnah massal. Tak diragukan lagi bahwa banyak pihak juga yang meragukan legalitas PSI dibawah hukum internasional.

Pada umumnya, Indonesia keberatan dengan adanya intervensi dari pihak asing - selain dua negara pantai lainnya- dalam menjaga keamanan di Selat Malaka. Indonesia pun juga masih meragukan legalitas PSI dibawah Hukum Laut

¹⁹ Hal ini diungkapkan oleh Havas di sela-sela sidang ke-9 *United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea* (UNICPOLOS) yang berlangsung pada 23-27 Juni di Markas Besar PBB, New York. Lihat *RI Masih Belum Mau Bergabung Dengan PSI*. Kamis, 26 Juni 2008. <http://www.antara.co.id/arc/2008/6/26/ri-masih-belum-mau-bergabung-dengan-psi/>

²⁰ Pasal 21 UNCLOS 1982, *Laws and regulations of the coastal State relating to innocent passage*, 1. *The coastal State may adopt laws and regulations, in conformity with the provisions of this Convention and other rules of international law, relating to innocent passage through the territorial sea, in respect of all or any of the following: (a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic; (b) the protection of navigational aids and facilities and other facilities or installations; (c) the protection of cables and pipelines; (d) the conservation of the living resources of the sea; (e) the prevention of infringement of the fisheries laws and regulations of the coastal State; (f) the preservation of the environment of the coastal State and the prevention, reduction and control of pollution thereof; (g) marine scientific research and hydrographic surveys; (h) the prevention of infringement of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State.* 2. *Such laws and regulations shall not apply to the design, construction, manning or equipment of foreign ships unless they are giving effect to generally accepted international rules or standards.* 3. *The coastal State shall give due publicity to all such laws and regulations.* 4. *Foreign ships exercising the right of innocent passage through the territorial sea shall comply with all such laws and regulations and all generally accepted international regulations relating to the prevention of collisions at sea.*

²¹ Pasal 23 UNLCOS 1982, *Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances*. *Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances shall, when exercising the right of innocent passage through the territorial sea, carry documents and observe special precautionary measures established for such ships by international agreements.*

Internasional (UNCLOS). Bentuk campur tangan dan upaya internasionalisasi Selat Malaka merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Oleh karena itu, Indonesia hanya menerima bantuan pihak asing seperti dari Amerika Serikat dalam hal peralatan dan teknologi.

1.1.4 Kapabilitas Militer Indonesia

Kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan di Selat Malaka memiliki permasalahan, terutama dalam kapabilitas keamanan maritim. Sesungguhnya, kapabilitas keamanan maritim lebih berbasis pada kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), bukan pada personel seperti pada angkatan darat.²² Dapat diibaratkan bahwa kekuatan laut bertumpu pada alat dan teknologi yang digunakan.

Menurut Henry Xu Ke, kapabilitas keamanan maritim Indonesia memiliki kekurangan dalam hal *Money (budget)*, *Manpower (personnel)*, *Machines (ships)*, dan *Methods (skills and training)*.²³ Dalam hal *money*, Indonesia masih memiliki kelemahan akan terbatasnya anggaran pertahanan.²⁴

Berdasarkan kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) ada 133 unit dengan yang siap dioperasikan sebesar 50,82%. Untuk kendaraan tempur marinir dari berbagai jenis ada sejumlah 435 unit dengan yang siap dioperasikan hanya 36,09%. Lalu untuk jumlah pesawat terbang yang tersedia sebesar 71 unit dengan yang siap beroperasi sebesar 52%.²⁵ Kondisi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebagian besar berusia 25-40 tahun menandakan bahwa postur kekuatan TNI masih jauh dari standar.²⁶ Selain itu, jumlah armada laut Indonesia yang diperkirakan hanya sebesar 45000 personel.²⁷

Berdasarkan hal ini kondisi internal Indonesia untuk meningkatkan strategi pertahanan keamanan masih memiliki kelemahan. Selain itu, berdasarkan letak

²² Connie Rahakundini Bakrie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 178.

²³ Hal ini dituliskan oleh Dr Henry Xu Ke dalam *The Indonesian New Maritime Security Proposal* yang dimuat di *Maritime Monitor*. 2007. Hal 13-14.

²⁴ *Ibid*. Hal 4

²⁵ *Ibid* Hal 102

²⁶ *Ibid*

²⁷ *The Military Balance: East Asia and Australasia 2006*. Hal 389.

dan bentuk geografi Indonesia, seharusnya hal tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatkan kemampuan kapabilitas keamanannya.²⁸ Strategi pertahanan dilakukan dalam rangka pertahanan negara dengan mengetahui tiga hal mendasar, yaitu apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, dan bagaimana mempertahankannya.²⁹

Merujuk pada kapabilitas militer Indonesia yang demikian, Indonesia tetap mengandalkan kerjasama tiga negara pantai dalam pengamanan di Selat Malaka. Indonesia tidak menghiraukan setiap tawaran kerjasama selain dari dua negara pantai lainnya untuk meningkatkan keamanan, terutama dalam hal gelar kekuatan militer. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif turut memengaruhi strategi pertahanan yang dipilih Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan keamanan, termasuk di Selat Malaka.

Sesungguhnya, strategi pertahanan keamanan yang dapat dipilih negara ketika merasa terancam sangat bervariasi. Negara dapat melakukan perimbangan kekuatan dengan meningkatkan kekuatan internalnya (dari segi militer), bergabung bersama sumber pembuat ancaman, bergabung dengan negara yang lebih kuat, atau bahkan melakukan perimbangan kekuatan dengan berfokus pada implementasi kebijakan luar negerinya. Tentunya semua hal tersebut harus sejalan dengan kepentingan yang ingin dicapai, terutama dalam hal keamanan. Keberatan Indonesia terhadap *Proliferation Security Initiative* menandakan bahwa Indonesia telah memilih strategi pertahanan untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan diletakkannya UNCLOS sebagai salah satu dasar peraturan pertahanan keamanan di Selat Malaka, maka *littoral state*; yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan kerjasama dalam pertahanan keamanan. Selain itu, dengan kondisi Selat Malaka yang demikian strategis, membuat dunia internasional, terutama *user state* untuk turut menawarkan kerjasama pertahanan keamanan di selat tersebut. Akan tetapi, strategi pertahanan yang dipilih masing-

²⁸ Clark G. Reynolds. 1958. *Command of The Sea: The History and Strategy of Maritime Empires*. Hal 20.

²⁹ Lihat Strategi Pertahanan Negara. 2007. Departemen Pertahanan RI. Hal 2.

masing ketiga negara tersebut memiliki perbedaan, terutama ketika datangnya tawaran *Proliferation Security Initiative*.

Merujuk pada normatif, sikap Indonesia yang berkeberatan dengan *Proliferation Security Initiative*, berarti dalam hal ini Indonesia menolak untuk bergabung dengan kekuatan besar (kuat). Indonesia menolak melakukan *bandwagoning* dengan kekuatan yang ada di dalam PSI (yang diusung AS). Padahal, PSI didukung oleh Resolusi DK PBB No. 1540. Dengan demikian Indonesia sepatutnya melakukan penguatan kapabilitas militer sebagai bentuk strategi *balancing* pertahanan di Selat Malaka. Pada kenyataannya, Indonesia yang masih memiliki kelemahan dalam kapabilitas keamanan maritim lebih memilih untuk bekerjasama dengan Singapura dan Malaysia. Dapat diibaratkan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah. Menjalinkan kerjasama pertahanan, terutama dengan *littoral state*, lalu juga dengan negara-negara di kawasan (India, Thailand, Jepang, Cina dan Korsel) dan AS dalam bentuk teknis. Dalam hal ini, Indonesia memilih strategi *hedging* sebagai bentuk penolakan terhadap PSI.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Mengapa Indonesia memilih strategi *hedging* sebagai penolakan terhadap *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka Periode 2006-2008?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka periode 2006-2008.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia memilih strategi *hedging* di Selat Malaka periode 2006-2008.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Menjadi sumbangan pemikiran terhadap kajian ilmu hubungan internasional, agar dapat lebih memahami alasan penolakan Indonesia terhadap *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka periode 2006-2008.

2. Menambah pengetahuan dengan membongkar lebih dalam mengenai alasan pemilihan strategi *hedging* yang dipilih Indonesia di Selat Malaka periode 2006-2008.

1.6 Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

1.6.1 Formasi Konsep

Dalam kerangka studi hubungan internasional, setiap peristiwa yang terjadi dapat dilihat dan dianalisis dalam berbagai konsep dan teori. Untuk menjelaskan strategi pertahanan keamanan yang dipilih Indonesia di Selat Malaka sebagai penolakan terhadap *Proliferation Security Initiative*, maka konsep yang diusung dalam penelitian ini adalah konsep *power* (kekuatan). Hal ini terkait dengan negara yang merupakan aktor utama sangat mementingkan keamanan. Oleh karena itu, setiap negara memiliki perilaku yang berbeda dalam berjuang memperoleh *power* demi terciptanya keamanan.

Para realis berpendapat, bahwa keamanan hanya akan tercapai jika negara memiliki *power* (kekuasaan) dalam hal militer. Oleh karena itu, dalam hal ini didapatkan sebuah konsep mengenai *power* (kekuatan). Menurut Morgenthau (*political*) *power* merupakan *psychological relation between those who exercise it and those whom it is exercised*.³⁰

Sejalan dengan hal tersebut, konsep keamanan juga mengacu pada berbagai interaksi antar aktor yang terjadi didalamnya.³¹ Hal ini sejalan dengan realisme yang menempatkan negara sebagai aktor utama. Paul R. Viotti dan Mark Kauppi mengasumsikan realisme ke dalam empat hal penting, yaitu:³²

1. *States are the principal or most important actors*. Negara direpresentasikan sebagai kunci dari unit analisis.
2. *The state is viewed as unitary actor*. Negara menerapkan satu kebijakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang berbeda.

³⁰ Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson. 1985. *Politics among Nations: Struggle for Power and Peace*. Miller Center of Public Affairs. University of Virginia. Hal 32.

³¹ Lihat Aleksius Jemadu. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 137.

³² Paul R. Viotti dan Mark Kauppi. 1993. *International Relations Theory*. New York: Macmillan Publishing Company.

3. *The state is essentially a rational actor.* Negara merupakan aktor paling rasional yang bertindak untuk dirinya sendiri.
4. *Within the hierarchy of international issue, national security usually tops the list.* Keamanan nasional yang dikaitkan dengan Negara menekankan bahwa keamanan dipandang sangat penting. Hal ini juga menandakan akan pentingnya kekuatan (*power*).

Negara sebagai entitas politik yang berdaulat dan independen merupakan unit analisis yang menjadi fokus bagi realisme. Aktor-aktor lain hanyalah bersifat sekunder, karena dinamika politik internasional, terutama keamanan, sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa negara tidak segan untuk menggunakan kekuatannya jika merasa terancam. Selain itu, realisme berpendapat bahwa kerja sama internasional hanya dapat berlangsung dibawah keadaan yang hegemon, ketika negara yang dominan menggunakan kekuasaannya dalam membuat dan menyelenggarakan peraturan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara.³³ Oleh karenanya, realisme mengasumsikan politik internasional merupakan negara-negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan instrumen utama berupa kekuatan militer.

³³ Lihat Christian Reus-Smit. 2005. *Theories of International Relations (3rd edition)*. New York: Palgrave Macmillan. Hal 190

1.6.2 Teori

Keamanan maritim merupakan salah satu isu keamanan yang mendapat perhatian terkait dengan fungsi wilayah maritim yang makin strategis dalam kepentingan negara-negara di dunia yang mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanannya.³⁴ Pasalnya, wilayah maritim masih menjadi urat nadi utama interaksi ekonomi global sehingga keamanan maritim merupakan isu krusial bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Command of The Sea

Sesuai dengan pemikiran realis bahwa kekuatan (penggunaan militer) mutlak diperlukan untuk keamanan. Dalam konteks keamanan di Selat Malaka, maka keamanan laut sangatlah menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, strategi pengendalian keamanan laut menjadi hal krusial untuk mengatur setiap pergerakan lalu lintas di Selat Malaka. Tentunya hal ini harus didukung oleh kekuatan militer dan teknologi yang memadai.

Menurut Clark G. Reynolds dalam *Command of The Sea*, belum ada satu pun fungsi angkatan laut setipe dengan strategi angkatan laut (*navy strategy*).³⁵ Oleh karena itu, untuk memudahkan, Reynolds memberikan tiga panduan dalam mengidentifikasi sekaligus memahami fungsi angkatan laut, yaitu *maritime or "blue-waters" nations*, *continental nations* dan *small nations*.

Fungsi angkatan laut pada *maritime nations* (negara maritim), ada enam, yaitu pertama *maintain a superior fighting fleet either a) to seize command of the sea, or b) to deter an enemy from attempting to control the sea*. Dalam hal ini, negara harus mempunyai armada tempur yang unggul, baik itu untuk memegang *command of the sea* atau untuk mencegah pihak lain (musuh) yang memegang *command of the sea*. Ketika dalam masa perang, armada ini cenderung bersifat sebagai *active force* dan mempertahankan kontrol, baik itu di laut terbuka, sungai, danau atau pun pesisir. Saat tidak berperang, maka armada ini akan bersifat sebagai *passive force* dan menunjukkan pada pihak lain akan kemampuannya

³⁴ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: Dephan RI. 2008. Hal 16.

³⁵ Clark G. Reynolds. *Opcit.* Hal 32

dalam mendominasi perairan yang pada akhirnya diharapkan dapat menghalangi datangnya agresi.

Kedua, *defend against invasion* dimana armada bertindak untuk melindungi pantai, baik di masa damai atau pun perang dari ancaman pihak asing. Ketiga, *protect maritime commerce* dimana armada harus melindungi para pengguna pelayaran dari berbagai macam bentuk kejahatan. Selanjutnya, fungsi keempat, *blockade the enemy coast* yang berkaitan dengan tindakan memblokade pantai musuh dengan mencegah terhadap penggunaan pantai bagi perdagangan musuh. Hal yang harus dilakukan adalah menghancurkan atau menetralkan armada perang musuh terlebih dahulu baru kemudian memblokade kapal-kapal komersial. *Blockade* dapat dilakukan secara langsung dengan menempatkan armada yang tersisa di stasiun atau pelabuhan musuh, atau bisa juga tidak langsung, armada yang tersisa mengamati dan menggagalkan gerakan kapal musuh dari jarak yang cukup jauh.

Fungsi yang kelima, yaitu angkatan laut terlibat dalam *engage in combined operations* (terlibat dalam operasi gabungan) baik secara ofensif atau defensif. Dalam hal ini terlibat operasi gabungan dengan angkatan darat termasuk angkatan udara dengan melindungi jalur komunikasi, pantai dan *inland waters* dan juga laut wilayah termasuk kawasan udara.

Selain itu, fungsi keenam, *provide strategic bombardment* dalam arti keunggulan angkatan laut akan tercipta jika kekuatan tersebut dapat diproyeksikan sebagai *continental strategy*. Lebih lanjut Clark menegaskan bahwa bagi negara maritim, *navy* (angkatan laut) harus menjadi kekuatan (senjata) utama dalam struktur pertahanan dengan mendominasi setiap kebijakan pertahanan.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka bagi *maritime nations*, angkatan laut digunakan sebagai kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi tidak hanya di laut, tapi juga sungai, dan danau. Selain itu, angkatan laut merupakan peralatan pertahanan dalam melindungi negara dari serangan musuh, baik dalam keadaan damai atau perang. Lebih lanjut, angkatan laut juga digunakan untuk

³⁶ *Ibid*

melindungi dan mengatur lalu lintas jalur laut (perdagangan, komunikasi dan transportasi).

Angkatan laut (yang juga dikombinasikan dengan kekuatan udara) bagi *continental powers* merupakan senjata strategis pertahanan nasional. Operasi-operasinya yang bersifat ofensif akan bergantung pada kekuatan maritim yang dimiliki sekutu. Angkatan laut ini memiliki empat fungsi, yaitu pertama *defend against invasion* baik itu di pantai, sungai, danau atau daratan. Kedua, *engaged in combine operations* dimana angkatan laut terlibat dalam berbagai operasi gabungan bersama angkatan darat. Ketiga, *attack enemy commerce* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *guerre de course* dimana angkatan laut memiliki teknik untuk menyerang perdagangan musuh, baik itu beroperasi melalui skuadron kecil atau unit kapal tunggal. Keempat, untuk mempertahankan dua hal, yaitu membatasi tindakan ofensif musuh dan untuk mencegah musuh dalam mendominasi perairan lokal. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan pembangunan kekuatan kapal perang yang canggih.

Bagi *small nations*, baik angkatan laut dan angkatan darat hanya bisa berharap untuk dapat bersekutu dengan pemegang kekuatan besar. Namun, dalam berbagai situasi angkatan laut tersebut harus tetap siap untuk melakukan tiga tugas, yaitu pertama bertahan terhadap serangan musuh. Dalam hal ini, *inshore craft* dan senjata dapat digunakan untuk memperbesar kekuatan pasukan dan sekutu dalam menggagalkan serangan di laut atau di darat. Kedua, *inshore craft* dan *river craft* dan juga kapal penjelajah dipergunakan sebagai polisi perairan dalam keadaan damai untuk mengawasi kejadian pembajakan. Jika dalam keadaan perang, kekuatan ini akan bergabung dengan sekutu. Lalu ketiga, dalam menyerang perdagangan musuh, biasanya memanfaatkan kapal penjelajah sebagai pemburu. Angkatan laut ini akan terkesan hebat dengan kekuatan kecil, tapi tanpa sekutu mereka tidak dapat mengubah konflik terbuka yang terjadi.

Panduan yang dijabarkan Clark G. Reynolds tersebut juga berkaitan dengan salah satu konsep *sea power* yang diusung Sam J. Tangredi, bahwa angkatan laut merupakan elemen senjata yang nyata akan *sea power*. Selain itu, pelayaran maritim, kegiatan di pelabuhan, sumber daya alam bawah laut (seperti minyak), penangkapan ikan dan segala macam bentuk komersialisasi dan

komunikasi melalui perairan dapat dihubungkan dengan *sea power* suatu negara. *Sea Power* merupakan konsep yang luas dengan 4 elemen³⁷, yaitu:

1. *The control of international trade and commerce*
2. *The usage and control of ocean resources*
3. *The operations of navies in war*
4. *The use of navies and maritime economic power as instruments of diplomacy, deterrence, and political influence in time to place.*

Melalui *command of the sea*, setiap peristiwa dan kondisi yang ada di Selat Malaka dapat dioperasionalkan secara menyeluruh. Dengan demikian diharapkan dapat dijelaskan mengenai strategi pertahanan keamanan di Selat Malaka.

Selain itu, perjuangan negara mendapatkan *power* tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan tindakan negara ketika menghadapi ancaman yang datang. *Defensive Realists* seperti Kenneth Waltz (1979)³⁸ berpendapat bahwa faktor struktural kekuasaan negara membatasi berapa banyak keuntungan yang diperoleh, dalam kompetisi keamanan. Lebih lanjut, menurut Waltz, sangat tidak bijaksana bagi negara untuk memaksimalkan *share of world power* karena sistem akan 'menghukum' negara jika mencoba untuk mendapatkan kekuasaan terlalu banyak.

Berbeda dengan *Offensive Realists* seperti John J. Mearsheimer (2001)³⁹ yang mempertahankan bahwa struktur sistem mendorong negara untuk memaksimalkan untuk *share of world power*, termasuk mengejar hegemoni, yang memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kompetisi keamanan. Pasalnya, sangat masuk akal jika negara berusaha untuk memperoleh *power* sebanyak-banyaknya, dalam rangka hegemoni. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup negaranya.

Balance of power menekankan pada efektivitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara dengan melihat kekuatan negara lainnya. Teori ini juga merujuk pada distribusi kemampuan/ kapabilitas negara pesaing ataupun aliansi yang ada.

³⁷ Sam J. Tangredi. 2002. *Globalization and Sea Power: Overview and Context* dalam *Globalization and Maritime Power*. Washington D.C.: National Defense university Press. Hal 3.

³⁸ Lihat John J. Mearsheimer dalam *Structural Realism*. 2006. Hal 71-72.

³⁹ Lihat John J. Mearsheimer dalam *Structural Realism*. 2006. Hal 71-72.

Dengan menggunakan teori *balance of power* maka setiap peningkatan kapabilitas militer (*power*) pertahanan terutama militer akan direspon balik oleh negara lainnya karena merasa terancam dengan kondisi demikian. Oleh karenanya, negara cenderung melakukan strategi *balancing*.

Seiring dengan perkembangan zaman, negara cenderung tidak menekankan hanya pada peningkatan kekuatan militer. Beragamnya ancaman membuat negara merespon dengan melakukan aliansi atau bersekutu, terutama dengan negara penyerang.⁴⁰ Dengan bergabung bersama negara agresor, maka negara berharap dapat mengamankan dirinya dari serangan atau ancaman. Dengan arti lain, berarti negara memilih untuk bergabung dengan negara yang paling mengancam. Dalam hal ini negara melakukan strategi *bandwagoning*.

Strategi *balancing* dan *bandwagoning* merupakan respon negara terhadap setiap ancaman yang datang. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat ancaman yang dihadapi negara. Stephen M. Walt⁴¹ menganjurkan untuk melihat dampak ancaman pada *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability* dan *offensive intentions*.

1.6.2.1 Strategi *Balancing*

Asumsi realis bahwa negara selalu berjuang untuk mencapai *power* terutama *military power*, maka muncul teori *Balance of Power* untuk menciptakan kedamaian dunia. Proposisi yang menyatakan bahwa negara akan bergabung dalam aliansi untuk menghindari dominasi *stronger power* berada dalam jantung teori *Balance of Power*. Berdasarkan hipotesis ini, negara bergabung dengan aliansi untuk melindungi dirinya sendiri atau koalisi terkuat yang dapat menimbulkan ancaman. Menurut Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*, teori *Balance of Power* memahami konsep *balancing* sebagai tindakan negara dalam mempertahankan posisinya dalam sistem, bukan meningkatkan

⁴⁰ Stephen M. Walt. 1985. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security Vol 9 No 4. The MIT Press. Hal 4.

⁴¹ *Ibid* Hal 9.

kekuatan.⁴² Lebih lanjut, Schweller menambahkan bahwa tujuan *balancing* merupakan pertahanan diri dan perlindungan nilai-nilai.⁴³ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa *balancing* digerakkan oleh dorongan untuk menghindari kekalahan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini *balancing* merupakan strategi negara untuk meningkatkan kemampuan militernya (kapabilitas internal) untuk mengimbangi ancaman atau lawan. Dalam *balancing* tidak ada tindakan untuk melawan ancaman atau lawan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Stephen M. Walt bahwa ketika memasuki sebuah ranah aliansi, maka negara dapat melakukan *balance* yaitu menjadi oposisi dari sumber bahaya.⁴⁴

Menurut Walt ada dua alasan utama bagi negara untuk melakukan *balancing*, yaitu kalau negara gagal mengekang kekuatan hegemon sebelum menjadi kuat, maka sama saja negara tersebut membahayakan usaha mereka. Pasalnya, jika negara tidak melakukan *balancing*, maka negara tersebut mempunyai resiko kegagalan untuk mengekang sebuah hegemoni yang potensial sebelum semakin menguat.⁴⁵ Untuk beraliansi dengan suatu kekuatan yang mendominasi berarti telah menempatkan suatu kepercayaan dalam suatu kebaikan yang berkesinambungan. Strategi teraman yaitu bergabung dengan pihak yang tidak mudah mendominasi aliansi, untuk menghindari dari pihak yang mudah mendominasi. Seperti yang dijelaskan oleh Winston Churchill mengenai kebijakan aliansi tradisional Inggris:

“For four hundred years the foreign policy of England has been to oppose the strongest, most aggressive, most dominating power on the Continent. . . . it would have been easy . . . and tempting to join with the stronger and share the fruits of his conquest. However, we always took the harder course, joined with the less strong Powers, . . . and thus defeated the Continental military tyrant whoever he was. . . .”

⁴² Kenneth N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Berkeley: Addison-Wesley Publishing Company. Hal 126

⁴³ Randall L. Schweller. Summer, 1994. *Bandwagoning for Profit*. International Security, Vol 19, No 1. The MIT Press. Hal 74.

⁴⁴ Stephen M. Walt. Spring. 1985. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security Vol 9 No. 4. MIT Press. Hal 4

⁴⁵ *Ibid.* Hal 5.

Kedua, dengan bergabung sesama negara yang diserang, maka dapat meningkatkan pengaruh pada anggota baru. Oleh karena itu, negara yang melakukan *balancing* yaitu bergabung dengan pihak yang paling rentan dapat meningkatkan dukungan dari anggota yang baru (memiliki kondisi yang sama). Pasalnya, pihak yang lebih lemah sangat banyak membutuhkan dukungan. Sebaliknya, bergabung dengan pihak yang lebih kuat, akan mengurangi dukungan dari anggota baru (karena akan semakin sedikit menambah koalisi) dan sangat jauh dari keinginan untuk menambah keanggotaan. Bergabung dengan pihak yang lemah merupakan pilihan yang terbaik.⁴⁶ Kenneth Waltz⁴⁷ berpendapat bahwa:

Secondary states, if they are free to choose, flock to the weaker side; for it is the stronger side that threatens them. On the weaker side, they are both more appreciated and safer, provided, of course, that the coalition they join achieves enough defensive or deterrent strength to dissuade adversaries from attacking."

Jika *balancing* menjadi kecenderungan dalam hubungan internasional, maka negara yang terancam akan memprovokasi negara lainnya untuk beraliansi melawan negara pengancam. Karena negara yang berusaha mendominasi negara lainnya akan menimbulkan oposisi yang meluas, status quo negara akan dapat melihat ancaman secara lebih optimis. Dalam sebuah keadaan *balancing*, kebijakan untuk menahan diri dan menunjukkan kebaikan merupakan hal yang terbaik. Negara-negara yang kuat akan dilihat sebagai sekutu karena mereka banyak menawarkan sekutunya, tapi mereka harus bisa menghindar untuk terlihat agresif. Kebijakan luar negeri dan pertahanan yang meminimalisir ancaman pada negara lain menjadi arti yang sangat penting di dunia.

Dalam literatur hubungan internasional, konsep *balancing* kadang-kadang terlihat samar, tapi secara umum tersirat tindakan kuat melawan sebuah kekuatan hegemoni atau kekuatan yang mengancam, sebuah situasi yang secara implisit dipahami sebagai pilihan lebih baik dimana kekuatan yang mendominasi tidak

⁴⁶ *Ibid.* Hal 6.

⁴⁷ Kenneth N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Berkeley: Addison-Wesley Publishing Company. Hal 127.

tertandingi.⁴⁸ Sebuah negara akan memilih untuk *unilateral balancing* atau *internal balancing*, membangun sendiri kapabilitas militer sebagai *deterrent* terhadap kekuatan lain, atau memilih beraliansi dengan negara lain dalam rangkian untuk menantang dan mengancam kekuatan lain. Selain itu, Evelyn Goh dalam *Great Power and Hierarchical Order in Southeast Asia* berpendapat bahwa keputusan negara kecil untuk melakukan *balancing* turut dipengaruhi oleh perhitungan termasuk *high political* dan biaya strategi *balancing*.⁴⁹

Pada kenyataannya, teori *balance of power* menjelaskan dan menunjukkan bahwa negara yang menghadapi ancaman eksternal cenderung untuk memilih melakukan *balancing* daripada *bandwagoning* terhadap ancaman tersebut. Pasalnya, suatu keadaan yang *balancing* dapat menjamin kebebasan sebagian besar negara dibawah kondisi yang hegemon.

1.6.2.2 Strategi *Bandwagoning*

Istilah *bandwagoning* pertama kali muncul sebagai deskripsi akan perilaku aliansi internasional dari Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*. Dalam politik internasional, momentum bergerak pada keberuntungan dan mengakselerasikan gerakannya. Penampakan *irreversibility* di satu sisi melemahkan, dan menstimulasi di sisi lainnya. Di sisi lain, *Bandwagon* membuat hal tersebut menjadi satu. Dalam hal ini, Waltz menggunakan istilah *bandwagoning* sebagai lawan dari *balancing*, yang berarti bahwa *bandwagoning* lebih memilih bergabung bersama koalisi yang lebih kuat.

Stephen Walt menawarkan pembaharuan dari Teori *Balance of Power*, yang disebut dengan Teori *Balance of Threat*. Teori ini mengusung strategi *bandwagoning* yang seringkali dianggap bertolak belakang dengan *balancing*. Di sisi lain, Schweller berpendapat bahwa *Balance of Threat* diciptakan hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keamanan.

Ada dua motivasi untuk melakukan *bandwagoning*, yaitu pertama *bandwagoning* dilakukan sebagai sebuah bentuk ketentraman (*appeasement*).

⁴⁸ Waltz (1979) dan Walt (1987) dalam Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 3.

⁴⁹ Evelyn Goh. Winter 2007. *Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies*. *International Security* vol 32 No. 3. Hal 116.

Beraliansi dengan negara atau koalisi berada di pihak mengancam, maka negara pelaku *bandwagoning* berharap dapat menghindari serangan yang ditujukan bagi dirinya dengan mengalihkannya ke pihak lain.⁵⁰ Hal tersebut dilakukan dengan harapan negara pelaku *bandwagoning* dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan. Dalam hal ini *bandwagoning* digunakan untuk alasan *defensive* dengan arti untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman yang datang.

Kedua, negara akan beraliansi dengan pihak yang paling dominan untuk berbagi akan rampasan kejayaan. Dengan bergabung bersama pihak yang lebih kuat, masing-masing negara berharap mendapat keuntungan dari teritorial di akhir peperangan. Pada motif yang kedua, *bandwagoning* digunakan untuk alasan *offensive* dalam arti untuk mendapatkan wilayah kekuasaan.⁵¹ Terlepas dari kedua motif tersebut, pada umumnya *bandwagoning* memiliki tindakan yang berbeda dari *balancing*.

Bandwagoning terjadi bila suatu negara memilih untuk menyesuaikan diri secara strategis terhadap kekuatan yang mengancam dalam rangka untuk membatasi ancaman, menetralsir atau mengambil keuntungan dari distribusi kekuasaan yang baru.⁵² Jika dunia dalam keadaan yang *bandwagoning* maka akan terjadi persaingan yang kompetitif. Jika negara beraliansi dengan negara yang paling kuat dan mengancam, maka negara dengan kekuatan terbesar akan dihargai jika mereka menunjukkan kekuatan dan ancaman yang potensial. Oleh karena itu, negarawan percaya jika *bandwagoning* meluas, maka negara-negara akan cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Pasalnya, negara lain dapat melakukan hal yang sama dan negara berasumsi bahwa negara lain tidak mungkin melakukan *balancing* terhadapnya.

Tiga kondisi dapat meningkatkan sedikit kecenderungan penurunan bagi negara untuk *bandwagoning*. Pertama, negara lemah cenderung melakukan *bandwagoning* dengan alasan mereka rentan terhadap serangan dan juga kemampuan mereka disisi lainnya tidak menimbulkan banyak perubahan.

⁵⁰ Stephen M. Walt. Spring. 1985. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security Vol 9 No. 4. MIT Press. Hal 7.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² (Waltz 1979; Schweller 1994) dalam Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 3.

Pasalnya, negara yang lemah hanya memengaruhi sebagian kecil dari hasil, maka mereka memilih negara yang menang. Kedua, negara lemah cenderung *bandwagoning* ketika tidak adanya sekutu untuk beraliansi. Bahkan, negara lemah dapat dipengaruhi untuk *balance* ketika mereka merasa mendapat dukungan aliansi, tapi akomodasi yang disediakan dari negara yang mengancam merupakan satu-satunya alternatif yang layak. Melalui hal tersebut dapat dilihat mengapa negara dengan kekuatan yang besar dapat menciptakan *sphere of influence*. Meskipun, negara kuat akan *balance*, negara-negara kecil dan lemah di sekitarnya merupakan calon paling kuat untuk melakukan *bandwagon*.

Pada dasarnya, *balancing* dan *bandwagoning* biasanya semata-mata digunakan dalam hal kekuasaan. *Balancing* adalah menyejajarkan dengan pihak lemah; *bandwagoning* berarti memilih yang kuat. Pandangan yang hanya berdasarkan pada *power* tersebut dianggap memiliki ketidaksempurnaan karena mengesampingkan faktor-faktor lain ketika negarawan mengidentifikasi ancaman potensial dan sekutu prospektif.⁵³ Meskipun *power* menjadi faktor utama dalam perhitungan negarawan, tapi *power* bukan faktor satu-satunya. Daripada dianggap bersekutu untuk menjadi penguasa tunggal, akan lebih tepat untuk dikatakan bahwa negara akan beraliansi dengan atau menentang *power* yang dianggap paling mengancam. Misalnya, dengan berbagai alasan, *weaker power* lebih berbahaya, maka negara akan melakukan *balance* dengan beraliansi bersama negara lain yang kuat. *Balancing* dan *bandwagoning* sangat akurat dilihat sebagai respon terhadap ancaman, maka penting untuk mempertimbangkan berbagai *faktor* yang akan memengaruhi setiap level ancaman yang akan dihadapi negara.

Walt menyebutkan faktor lain tersebut berupa *aggregate power*, *proximity*, *offensive capability*, and *offensive intentions*.⁵⁴ Sehubungan *aggregate power*, semakin besar total sumber daya sebuah negara (yakni populasi, kemampuan industri dan militer, kekuatan teknologi, dll), maka semakin besar potensi ancaman itu bagi negara lainnya. Negara yang memiliki kekuatan besar dapat menekan musuh atau mendapatkan teman. Maka dengan sendirinya, *aggregate*

⁵³ Stephen M. Walt. 1985. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security Vol 9 No 4. The MIT Press. Hal 7.

⁵⁴ *Ibid.* Hal 9.

power yang dimiliki negara lainnya dapat menjadi alasan untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning*.⁵⁵ Selain itu, faktor ancaman juga dikaitkan dengan *proximity*. Dalam hal ini, negara akan menyejajarkan dirinya dengan kekuatan terdekat. Negara yang lebih dekat akan menjadi ancaman lebih besar terkait dengan proyeksi kekuatan. Jika ancaman *proximity* memicu *balancing*, maka kemungkinan jaringan aliansi membentuk menyerupai *chekerboards*. Sebaliknya, jika ancaman *proximity* membuat negara melakukan *bandwagoning* maka akan tercipta sebuah fenomena yang familiar akan '*sphere of influence*'.

Sama saja dengan *offensive power*, negara-negara dengan kemampuan *offensive* yang lebih besar cenderung untuk memprovokasi aliansi dibanding negara yang memiliki kapabilitas lemah secara militer atau hanya mampu mempertahankan. Di sisi lain, ancaman langsung berupa kapabilitas dapat membuat negara melakukan *balancing* dengan beraliansi bersama negara lainnya. Sebaliknya, ketika *offensive power* melakukan penaklukan dengan cepat, maka negara-negara yang rapuh dapat melihat sedikit harapan. *Balancing* mungkin akan tampak tidak bijaksana karena suatu aliansi mungkin tidak dapat memberikan bantuan yang cukup cepat. Hal ini merupakan alasan lainnya mengapa '*sphere of influence*' dapat membentuk: negara-negara yang berbatasan dengan negara berkapabilitas *offensive* besar (dan jauh dari sekutunya) akan melakukan *bandwagoning* karena *balancing* dianggap tidak layak.

Pada akhirnya *offensive intention* turut memengaruhi. Pasalnya negara yang muncul secara agresif cenderung untuk memprovokasi negara lain untuk *balancing* melawan dirinya. Ketika negara tidak berubah menjadi agresif, maka yang lainnya tidak akan melakukan *bandwagoning*. Lagipula, jika niat agresor tidak dapat diubah, maka *balancing* dengan negara lain merupakan tindakan terbaik untuk menghindar menjadi korban.

Dengan menyempurnakan dasar pertimbangan beberapa sumber ancaman, maka akan didapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan negarawan ketika akan membuat pilihan aliansi. Namun, tidak ada satu pun yang dapat mengatakan secara apriori yang mana sumber ancaman

⁵⁵ *Ibid.*

yang paling penting, karena sebagian besar sumber ancaman tersebut memainkan perannya.

1.6.2.3 Strategi *Hedging*

Goh mendefinisikan *hedging* sebagai satu set strategi yang bertujuan untuk menghindari (atau direncanakan sebagai suatu hal yang kebetulan) sebuah situasi dimana negara tidak dapat memutuskan untuk melakukan alternatif selain *balancing*, *bandwagoning* atau bersikap netral.⁵⁶ Sebaliknya negara memilih berada di tengah-tengah atau menghindari untuk memilih berada disisi lainnya. Hal ini seperti ditegaskan Goh dalam *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*⁵⁷, menjelaskan konsep *hedging* sebagai:

"a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivates a middle position that forestalls or avoids having to choose one side [or one straightforward policy stance]"

Goh melalui studinya berargumen bahwa perilaku *hedging* di Asia Tenggara terdiri dari tiga elemen.⁵⁸ Elemen pertama yaitu *indirect balancing* (*soft balancing*), dalam hal ini negara membujuk negara-negara kuat lainnya, terutama AS untuk mengimbangi pengaruh regional China. Menurut Goh *Indirect balancing* merupakan kebijakan yang diciptakan untuk menghadapi kemampuan negara lawan dengan membatasi sebuah negara, baik itu dilakukan melalui *non-specific deterrence*, penguatan pertahanan, maupun membangun hubungan diplomatik, ekonomi, dan politik dengan negara ketiga, atau organisasi yang dapat menjadi pendukung negara ketika hubungan dengan lawan menjadi buruk.⁵⁹

⁵⁶ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 2.

⁵⁷ Evelyn Goh. 31 Agustus 2006. *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*. Pacific Forum CSIS: Honolulu, Hawai. Hal 1.

⁵⁸ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 3-4.

⁵⁹ Evelyn Goh. 31 Agustus 2006. *Opcit*. Hal 2.

Kedua, *hedging* memerlukan *engagement* yang kompleks dengan China pada tingkat politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan pemimpin China dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional. Dalam hal ini, kebijakan *engagement* dapat dipahami sebagai sebuah *constructive hedge* yang menentang agresivitas dominasi potensial China. Kebijakan *engagement* berusaha mengembangkan ikatan politik dan ekonomi dengan sebuah negara dan membawanya pada masyarakat internasional, sehingga mengubah preferensi dan aksi para pemimpin pada kecenderungan yang lebih damai.⁶⁰

Ketiga, *hedging* merupakan sebuah kebijakan umum akan *enmeshing* (mengumpulkan) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional. Semua pemikir mengatakan bahwa Asia Tenggara melakukan *hedging* terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dominasi atau hegemoni China, penarikan diri Amerika dari kawasan ini, dan ketidakstabilan tatanan di kawasan.

Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara tidak mempunyai pilihan untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning* terhadap negara yang lebih kuat.⁶¹ Di Asia Tenggara, ada konsensus dikalangan analis bahwa *subregion* mengadopsi strategi kembar *hedging* berupa *engagement* dengan China di satu sisi, dan di sisi lain melakukan *soft balancing* menentang potensial agresi China atau gangguan status quo. Strategi yang terakhir tidak hanya mencakup akuisisi dan modernisasi militer, tapi juga sebagai upaya untuk menjaga AS tetap terlibat dikawasan tersebut sebagai penyeimbang terhadap kekuatan China.⁶²

Sebuah negara yang dapat melakukan *hedging* (*hedger*) secara kuat adalah negara yang mampu membangun dan mempertahankan hubungan strategis secara dekat dengan dua kekuatan besar (AS dan China) pada saat yang bersamaan. Di kawasan Asia Tenggara negara *hedger* merasa lebih mampu memengaruhi negara-

⁶⁰ Johnston dan Ross (1999) dalam Kong dalam Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 3.

⁶¹ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 2.

⁶² Kong dalam Evelyn Goh. *Ibid.*

negara lain di kawasan dibanding dengan AS dan China, maka dengan ini *hedging* akan terlihat semakin rumit.

Ada dua anggapan yang mendasari hal tersebut. Pertama, negara-negara kecil dan menengah di Asia Tenggara tidak mengadopsi konsep *balancing* ataupun *bandwagoning* dalam menghadapi AS dan China. Sebaliknya mereka mengembangkan strategi *hedging* yang meliputi *indirect balancing*, *complex engagement*, dan *great power enmeshment*.⁶³ *Indirect balancing* di Asia Tenggara yaitu, ketika negara-negara Asia Tenggara berusaha membujuk AS sebagai pengimbang pengaruh regional Cina di kawasan. Lalu *complex engagement* dengan Cina pada level politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan bahwa para pemimpin Cina dapat disosialisasikan untuk mematuhi norma-norma internasional. Selain itu, kebijakan umum *enmeshing* (pengumpulan) sejumlah kekuatan besar dalam rangka untuk jaminan stabilitas kawasan.

Kedua, sementara strategi keamanan regional negara berbeda satu sama lain di Asia Tenggara, ada negara-negara yang muncul di garis depan yang memiliki karakteristik kesamaan strategi dengan China yang memerlukan *engagement* lebih besar dalam keikutsertaan AS di bidang politik, ekonomi serta militer. Dengan jelas dapat dipahami pengembangan strategi tersebut akan berguna dalam membentuk kerjasama dan kebijakan yang efektif antara AS dan negara-negara tersebut.

Pasca serangan teroris di Washington tanggal 11 September 2001, negara-negara di Asia Tenggara tidak melakukan *balancing* atau pun *bandwagoning*. Baik itu beraliansi dengan China atau AS. Akan tetapi, mereka mengembangkan *hedging* bersama negara-negara di kawasan. Dalam hal ini, selanjutnya perilaku *hedging* meliputi 'omnienmeshment' dari sejumlah kekuatan utama di kawasan yang bertujuan untuk mendorong sebuah struktur hierarkis keamanan yang dapat meningkatkan stabilitas regional.⁶⁴

Perilaku *hedging* tidak hanya berfokus pada negara-negara kunci dengan kekuatan besar, tapi juga dengan negara-negara di kawasan. Hal ini sejalan

⁶³ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 4.

⁶⁴ *Ibid.* Hal 7.

dengan tujuan akhir dari *hedging*, yaitu memengaruhi struktur keamanan regional.⁶⁵ Dalam hal ini *hedging* tidak dilakukan dengan negara-negara yang memiliki kekuatan besar atau pun multipolar, tapi negara di Asia Tenggara berusaha *hedging* terhadap negara di kawasan yang tentunya juga melibatkan sejumlah negara dengan kekuatan besar. Dengan cara ini, maka rasa memiliki untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional akan dapat didalami dan negara-negara di kawasan akan semakin tertarik menjaga stabilitas regional.

Beberapa negara di Asia Tenggara membayangkan suatu situasi dimana sejumlah negara besar seperti AS, Cina, Jepang, Korea Selatan dan India akan secara aktif terlibat di kawasan dalam hubungan politik yang baik, pertukaran ekonomi yang istimewa dan mendalam, beberapa tingkat pertukaran dan dialog pertahanan. Idealnya diharapkan bahwa akan tercipta stabilitas yang lebih baik di kawasan ini. Tentu saja, negara-negara besar akan saling mengawasi satu sama lain dan bertindak sebagai *deterrent* dengan berani. Dalam pengertian ini, *enmeshment* merupakan *hedging* terhadap kemungkinan persaingan kekerasan antara kekuasaan besar di kawasan dan agresi kekuatan besar terhadap negara-negara yang lebih kecil.⁶⁶

Tujuan dari strategi *hedging* berupa *great power enmeshment* tidak untuk menghasilkan *a multipolar balance of power* dalam pengertian yang konvensional, karena negara-negara besar yang terlibat disini tidak berada di perserikatan yang sama. Strategi *hedging* bertujuan untuk memfasilitasi sebuah transisi yang pada dasarnya tidak mengganggu distribusi *power* di kawasan. Tujuan ini berbeda dengan strategi *balancing* atau *bandwagoning* yang bertujuan untuk mencegah transisi kekuasaan atau untuk mencapai hasil revisionis dalam distribusi *power*.

Dalam menganalisis keamanan Asia Tenggara, wacana *balance of power* menyematkan dengan dua alasan. Pertama, negara-negara di Asia Tenggara telah mengadopsi berbagai strategi *hedging* daripada memakai *balancing* dan *bandwagoning* terhadap Cina atau AS. Kedua, sementara ketika distribusi dukungan *hard power* AS tidak akan berubah selama beberapa waktu, lebih cair

⁶⁵ *Ibid.*. Hal 29-30.

⁶⁶ *Ibid.* Hal 33-34.

dan menantang dalam perubahan *balance of influence* di Asia Tenggara dengan perkembangan hubungan dengan Cina yang stabil. Meski demikian, AS tetap menjadi penyedia barang-barang keamanan bersama di kawasan, memimpin dalam *counterterrorism*, *antipiracy*, *antitrafficking* serta militer *deterrence*.

Goh menegaskan bahwa dalam menganalisa kondisi di Asia Tenggara, strategi *hedging* lebih canggih dibanding *balancing* dan *bandwagoning*. Pasalnya, bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam mengoperasionalkan strategi pertahanan mereka, peran AS tetap dilihat sangat penting, tetapi kekuatan masing-masing yang dimiliki negara di kawasan juga harus diikutsertakan. Hal ini bertujuan untuk *enmeshment* (mengumpulkan) pemain utama di kawasan dalam rangka untuk membawa transisi *power* yang damai ke dalam hierarki dibawahnya. Strategi *hedging* merupakan representasi alternatif yang pragmatis signifikan yang dimaksudkan untuk mencegah suatu destabilisasi *power* dan juga untuk mengambil keuntungan dari AS. Jika AS mendukung strategi ini, maka hal yang paling efektif adalah fokus dalam hubungan diplomatik dan aspek ekonomi dalam memperluas pengaruhnya di kawasan.

1.7 Hipotesis

1. Indonesia memilih strategi *hedging* sebagai strategi pertahanan untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka selama periode 2006-2008.
2. Strategi *hedging* yang dilakukan Indonesia, yaitu dengan mengumpulkan kekuatan melalui kerjasama dengan *littoral state* maupun *user state*.
3. Alasan Indonesia melakukan *hedging* karena lemahnya kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka selama periode 2006-2008.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2008, sebagai bentuk penolakan terhadap *Proliferation Security Initiative*. Mengenai metodologi penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengupayakan penggambaran secara spesifik dari suatu situasi, mekanisme maupun proses berdasarkan informasi yang sifatnya elementer yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu penjelasan baru atas fenomena yang diteliti.⁶⁸ Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada pengembangan keadaan realitas sosial, proses interaktif dari subjek yang diteliti mengenai strategi *hedging* yang dipilih Indonesia sebagai bentuk strategi pertahanan di Selat Malaka. Hal tersebut berupa pengamanan Selat Malaka yang dilakukan oleh Indonesia bersama *littoral state* di kawasan tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, turut mengundang perhatian dunia untuk ikut serta.

Penggambaran yang muncul adalah berbagai proses yang dilakukan aktor-aktor dalam realitas sosial tersebut, yaitu kondisi keamanan di Selat Malaka, alasan penolakan Indonesia terhadap PSI, bentuk bantuan kerjasama yang mungkin diterima oleh Indonesia, dan juga pilihan strategi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan keamanan di Selat Malaka sebagai penolakan terhadap PSI.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dipakai untuk melakukan analisis kebijakan strategi pertahanan Indonesia. Melalui studi dokumen, maka metode pengumpulan data yang digunakan berupa penelusuran data secara

⁶⁷ Moleong, Lexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal 4.

⁶⁸ Lawrence W. Neumann dalam *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston. Hal 327

historis.⁶⁹ Pasalnya sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini dengan menggunakan pelacakan dokumen terkait objek penelitian berupa buku, jurnal, laporan-laporan, majalah, surat kabar, *website*, dokumentasi hukum, dokumen resi dai instansi terkait, dan media lainnya yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam empat bab. Bab pertama adalah latar belakang permasalahan yang terdiri dari kondisi keamanan Selat Malaka, kerjasama *littoral state* di Selat Malaka, tawaran *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka dan kapabilitas militer Indonesia, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, hipotesis, metodologi penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan. Bab dua memaparkan aplikasi *command of the sea* terhadap kondisi pengamanan di Selat Malaka periode 2006 – 2008 yang terdiri dari kondisi keamanan di Selat Malaka dengan rincian detail setiap peristiwa yang mengancam keamanan di Selat Malaka, usaha yang dilakukan Indonesia, kerjasama yang sudah dilakukan *littoral state* untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka, dan usaha Amerika Serikat untuk mengajak Indonesia ikut dalam *Proliferation Security Initiative* di Selat Malaka. Bab tiga menjelaskan strategi pertahanan yang dipilih Indonesia di Selat Malaka sebagai penolakannya terhadap PSI periode 2006 – 2008 yang akan dijabarkan kedalam tiga bentuk strategi pertahanan berupa *balancing*, *bandwagoning* atau *hedging* yang dipilih di Selat Malaka beserta kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka. Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akan pertanyaan penelitian dan saran mengenai permasalahan penelitian.

⁶⁹ Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. Hal 75.